

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Laporan keuangan merupakan salah satu komponen utama dalam pengelolaan usaha, baik skala besar maupun kecil yang terdiri dari beberapa unsur yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Istanti, 2022). Melalui laporan keuangan, pelaku usaha dapat memperoleh informasi terkait posisi keuangan, hasil operasional, serta arus kas yang berguna untuk proses evaluasi dan pengambilan keputusan ekonomi. Dalam konteks ini, kualitas laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting agar informasi yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi usaha yang sesungguhnya. Ikatan Akuntan Indonesia (2011) menegaskan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Wild, Subramanyam, dan Halsey (2014) juga menyatakan bahwa laporan keuangan adalah sarana utama untuk mengkomunikasikan informasi akuntansi dan mengevaluasi kinerja serta kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan juga bisa dikatakan relevan apabila informasi yang terdapat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna, sehingga informasi tersebut dapat membantu untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, dan bisa juga digunakan untuk memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu (Aprilia & Sulindawati, 2022). Dengan demikian, kualitas laporan keuangan menjadi hal yang sangat

penting agar informasi yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi usaha yang sesungguhnya.

Kualitas laporan keuangan tidak terlepas dari karakteristik kualitatif yang melekat di dalamnya. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Revisi 2009, karakteristik kualitatif tersebut mencakup relevansi, keandalan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Tanpa memenuhi karakteristik tersebut, laporan keuangan dapat menjadi kurang bermanfaat bahkan menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan yang tidak memiliki pengetahuan akuntansi mendalam.

Kualitas laporan keuangan mengacu pada sejauh mana laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang akurat dan benar. Laporan keuangan mengungkapkan transparansi dan akuntabilitas suatu perusahaan serta merupakan sarana informasi akuntansi untuk menyampaikan hasil kinerja pengelolaan keuangan kepada pihak lainnya (Pramana & Diatmika, 2024).

Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menetapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2018. SAK EMKM dibuat sebagai bentuk penyederhanaan dari SAK ETAP untuk memberikan panduan praktis bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangan. Dengan menerapkan SAK EMKM, UMKM dapat menyajikan informasi yang lebih rinci dibandingkan pencatatan berbasis kas. Informasi seperti pendapatan, beban, aset, liabilitas, laba, hingga dasar perhitungan pajak dan harga pokok penjualan dapat diperoleh secara jelas. Hal ini sangat membantu dalam perencanaan bisnis,

pengajuan kredit, serta evaluasi usaha. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM di Indonesia masih belum menerapkan SAK EMKM. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman terhadap pentingnya laporan keuangan serta anggapan bahwa pembukuan merupakan hal yang rumit dan tidak penting untuk usaha kecil.

Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat (Purnamawati, 2015). Ada banyak strategi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk pembangunan ekonomi nasional. Salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional adalah pengembangan dan pemberdayaan UKM (Dewi et al., 2020). Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang masih menerapkan perlindungan terhadap industri mikro, kecil, dan menengah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian. Pemerintah telah berusaha keras untuk meningkatkan dan mempertahankan UMKM sebagai industri lokal. Pemerintah daerah telah mengkategorikan UMKM ke dalam beberapa sektor seperti industri rumah tangga, perdagangan, pertanian, makanan, perikanan, kerajinan tangan. Permintaan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia masih baik pada tahun 2021, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah telah berupaya membantu permintaan bisnis dari masyarakat menengah ke bawah yang diharuskan untuk mempertahankan spesialisasi mereka di usaha mikro, kecil, dan menengah (Ramli et al., 2023). UMKM memiliki posisi yang sangat strategis, di mana sektor ini memiliki keunggulan yaitu lebih tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi, dapat memanfaatkan sumber daya lokal, usahanya relatif fleksibel dan memiliki peran penting dalam meningkatkan kekuatan ekonomi. Selain itu, UMKM

memiliki peran dan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional (Julianto et al., 2021).

Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kondisi ini didukung oleh perkembangan di bidang industri. Bagi perekonomian di Indonesia, UMKM memiliki peran yang amat penting dan strategis. Dengan banyaknya jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas serta memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan nasional. Secara umum, UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran penting yaitu Pertama, UMKM sebagai Pemeran Utama dalam kegiatan Ekonomi. Kedua, UMKM sebagai penyedia lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat lokal. Ketiga, UMKM mampu menciptakan persaingan pasar yang lebih inovatif karena terdapat unsur budaya dan kearifan lokal dari produk yang dihasilkan (Wiadnyana & Wahyuni, 2023). Adanya UMKM dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, UMKM menjadi penting karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan menyediakan peluang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi dan memberikan lapangan pekerjaan sehingga menurunkan tingkat pengangguran (Suarjana & Musmini, 2020).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 66 juta pada tahun 2023, dengan kontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). UMKM juga menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja nasional, (Kadin Indonesia, 2023).

Tabel 1.1
Data UMKM Indonesia Tahun 2018-2023

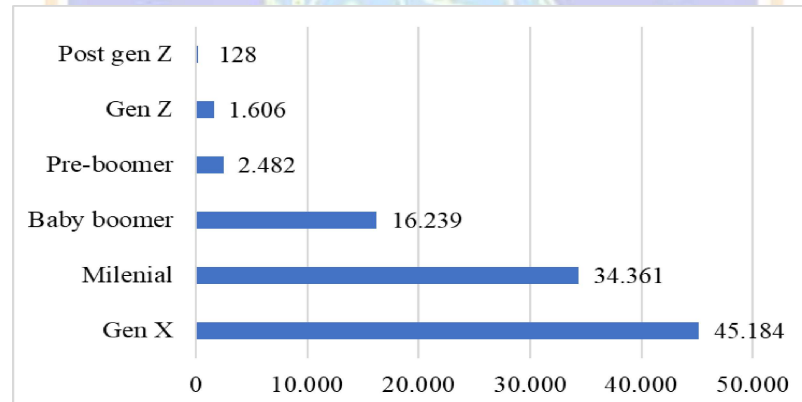
Data UMKM Tahun 2018-2023						
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM (Juta)	64.19	65.47	64	65.46	65	66
Pertumbuhan (%)		1.98%	-2.24%	2.28%	-0,70%	1,52%

Sumber: Data diolah (Kadin Indonesia, 2023)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2018 ialah 64.19 juta yang bertumbuh sebesar 1.98% pada tahun 2019 sehingga menjadi 65.47 juta. Namun pada tahun berikutnya jumlah UMKM mengalami penurunan sebesar -2.24% dan menjadi sejumlah 64 juta akibat pandemi Covid-19. Selanjutnya, pada tahun 2021 UMKM perlahan mulai bertumbuh kembali sebesar 2.28% sehingga menjadi 65.46 juta. Pada tahun 2022, UMKM kembali mengalami penurunan sebesar -0,70% sehingga jumlah UMKM menjadi 65 juta. Dan di tahun 2023 UMKM jumlah mengalami pertumbuhan sebesar 1,52% sehingga jumlah UMKM menjadi 66 juta.

Pada saat sambutan pembuka pada pertemuan dengan otoritas BI dan para direksi HIMBARA di Denpasar, Bali, Kamis (07/12/2023), Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menyampaikan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Bali selama triwulan III-2023 tumbuh sebesar 0,30 persen. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan II-2023 (q-to-q) dan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali triwulan III-2023 tumbuh sebesar 5,35 persen, dimana pertumbuhan tersebut didukung kontribusi UMKM (Husaini, 2023).

Selain meningkatkan PDB per tahun, bisnis ini juga menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), para pengusaha yang bergerak pada skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berasal dari beberapa generasi yakni, gen X yang berada pada urutan pertama dengan jumlah kelompok terbesar mencapai 45 ribu orang. Selanjutnya di urutan kedua terdapat generasi milenial dengan jumlah kelompok mencapai 34 ribu orang. Pada urutan ketiga didominasi oleh generasi *baby boomer* yang mencapai 16 ribu orang. Berikutnya golongan *pre-boomer* berada di urutan ke empat dengan jumlah mencapai 2.500 pengusaha. Selanjutnya terdapat generasi muda, seperti *gen Z* yang jumlahnya masih terbatas pada 1.600 orang saja, dan *post-gen Z* dengan jumlah sebanyak 128 orang saja (Nursanti et al., 2024).



Gambar 1.1

Kategori Generasi dengan Jumlah *Entrepreneur*

Sumber: Data diolah (Buku *Entrepreneurship : Strategi Dan Panduan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Yang Efektif* (Nursanti et al., 2024)

Didasari oleh buku *Entrepreneurship : Strategi Dan Panduan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Yang Efektif* (Nursanti et al., 2024), Kemenkop

UKM belum mendefinisikan perbedaan usia dari generasi-generasi tersebut. Akan tetapi klasifikasi serupa juga diterapkan oleh BPS yang meminjam pengklasifikasian dari William H. Frey, *Analysis of Census Bureau Population Estimates* (25 Juni 2020). *Post-gen Z* adalah mereka yang lahir pada 2013 dan tahun setelahnya. Sementara *gen Z* adalah kelahiran 1997-2012. Adapun Milenial diklasifikasikan untuk mereka yang lahir pada kisaran tahun 1981-1996. Sedangkan *gen X* adalah mereka yang lahir pada tahun 1965-1980. Angkatan *baby boomer* atau sering disebut *boomer* adalah mereka yang lahir pada tahun 1946-1964, sedangkan *pre-boomer* adalah mereka yang lahir pada tahun 1945 dan tahun-tahun sebelumnya (Santika, 2023). Merujuk pada data yang dirangkum melalui Statistika (2023), pada tahun 2022, tercatat bahwa lebih kurang delapan persen penduduk Indonesia yang berusia 18 hingga 64 tahun terlibat dalam kegiatan kewirausahaan tahap awal. Sementara itu, sekitar 5,7 persen memiliki usaha yang sudah mapan selama lebih dari 3,5 tahun. Adapun sebanyak 3,2 persen lebih fokus menjalankan kegiatan investasi secara informal.

UMKM atau disebut Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai andil besar untuk Indonesia dalam hal ekonomi. Pandangan terhadap pentingnya keberlangsungan penggiat UMKM pun dipandang serius oleh pemerintah di Indonesia. Terbukti, Koperasi dengan UMKM mewadahi diri mereka secara terkhusus yang mana kementerian koperasi dan UKM membawahnya. Perekonomian masyarakat bawah disangga oleh pemerintah diwujudkan dengan memberikan perhatian pada penggiat UMKM (Priyanto & Wahyuni, 2021).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah menjadi tulang punggung perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap

perekonomian tidak dapat dipandang sebelah mata, baik dari segi penciptaan lapangan kerja maupun pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, tantangan yang dihadapi UMKM, khususnya terkait pengelolaan keuangan, kerap kali menjadi kendala utama dalam perjalanannya menuju pertumbuhan berkelanjutan (Definta et al., 2024). Pengelolaan keuangan secara umum merupakan suatu usaha dalam mengelola dana atau uang pada kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan keuangan (Santiara & Sinarwati, 2023). Pengelolaan keuangan tidak hanya dianggap penting, tetapi bagi pihak internal dan eksternal bertanggung jawab guna mencatat dan mengedit laporan keuangan melalui praktik akuntansi yang baik sebagai bentuk akuntabilitas dan kinerja keuangan, juga yakni ukuran keberhasilan UMKM (Yuniartini & Sinarwati, 2022).

Permasalahan yang paling banyak dialami oleh pengusaha yang dalam hal ini adalah UMKM yaitu mengenai pengelolaan keuangan, baik berupa pencatatan transaksi sampai pada pelaporan keuangan. Para pelaku UMKM sampai saat ini, masih banyak yang belum memiliki sistem pembukuan yang benar menurut standar akuntansi, mereka beranggapan bahwa laporan keuangan bukan hal yang penting. Proses pembukuan yang dilakukan masih sangat sederhana dan dalam bentuk manual dengan hanya mencatat barang yang dijual dan pembelian bahan baku (Kurniawan et al., 2021).

Pemerintah telah menetapkan regulasi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Regulasi ini mendorong UMKM untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku agar dapat

mengakses pembiayaan dan menjadi bagian dari sistem keuangan formal. (Mulyaga, 2016). Dengan adanya Undang-Undang yang menjadi payung hukum, gerak UMKM menjadi lebih leluasa dimana dalam peraturan tersebut dicantumkan mengenai perluasan pendanaan dan fasilitas oleh perbankan dan Lembaga jasa keuangan non-Bank. Namun, meskipun peraturan pemerintah telah tertuang dengan jelas. Kenyataannya Bank umum cenderung menganggap pemberian kredit kepada UMKM lebih beresiko untuk terjadinya gagal bayar yang dikarenakan kredibilitasnya yang masih rendah (Damayanti et al., 2023). Di Bali, khususnya Kota Denpasar, UMKM berperan sangat besar dalam mendukung perekonomian daerah, terutama karena keterkaitannya dengan sektor pariwisata. Namun, masih banyak pelaku UMKM masih melakukan pencatatan secara manual dan terbatas pada transaksi kas masuk dan kas keluar. Hal ini menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang mampu mencerminkan kondisi keuangan secara menyeluruh dan menyulitkan dalam membuat keputusan strategis. Menurut riset OCBC Indonesia dalam *Business Fitness Index* pada tahun 2023, 80% pelaku usaha Indonesia masih melakukan pencatatan keuangan dan stok usaha mereka secara manual (Busthomi, 2024).

Selain itu UMKM menganggap bahwa pembukuan adalah sesuatu yang rumit, tidak memerlukan pencatatan karena masih kecilnya usaha serta belum memahami pentingnya pembukuan dan pencatatan dalam kelangsungan usahanya, padahal dengan adanya akuntansi yang memadai dapat membuat persyaratan pengajuan kredit seperti pembuatan laporan keuangan dapat terpenuhi (Soraya & Mahmud, 2016). Sehingga setiap usaha diharapkan mempunyai laporan keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan agar dapat memberikan informasi mengenai

posisi keuangan, menilai kinerja dan sebagai dasar pengambilan keputusan pengembangan UMKM. SAK EMKM dibuat lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP untuk menjadi acuan dalam memfasilitasi pelaku UMKM dalam menyiapkan laporan keuangan (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2016). SAK EMKM hanya membutuhkan laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan menggunakan keuangan SAK EMKM yang sederhana tidak membutuhkan orang yang berpendidikan tinggi maupun yang profesional dibidang akuntansi, selain itu juga dapat memberikan informasi yang tidak didapatkan saat UMKM mencatat dengan basis kas seperti informasi pendapatan, beban, laba dengan menggunakan akrual, jumlah aset, liabilitas, besarnya biaya produksi dan lainnya. Sehingga dapat membantu UMKM dalam menghitung pajak, menghitung dan menetapkan harga pokok dan harga jual produk, serta mempermudah mengakses pendanaan (SPA FEB UI, 2019).

Laporan keuangan dalam UMKM memainkan peran penting karena laporan keuangan memberikan informasi keuangan dari badan usaha, yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini laporan keuangan perusahaan pada tanggal dan periode tertentu. Sebagian besar UMKM hanya mencatat jumlah yang diterima dan dikeluarkan (Krisnayanti & Masdiantini, 2025). Kinerja perusahaan dapat diukur dan dinilai melalui laporan keuangan. Dengan mengemban peran penting bagi perusahaan, laporan keuangan yang berkualitas seharusnya diungkapkan sesuai fakta serta terhindar dari rekayasa (Wicaksono & Yuyetta, 2013). Dengan karakteristik kualitatif yaitu andal, relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan (PSAK No.1 Revisi, 2009). Apabila laporan keuangan tidak

mencakup karakteristik tersebut maka kurang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan yang tidak memiliki pengetahuan akuntansi (Rusmanto, 2008). Tujuan menyusun laporan keuangan menurut IAI (2011) ialah memberikan informasi sebenarnya mengenai kinerja perusahaan, posisi keuangan serta perubahannya yang berguna bagi pemakai laporan keuangan sebagai alat untuk mengambil keputusan. Keputusan yang diambil oleh pemakai laporan keuangan berdasarkan analisis terhadap informasi yang disajikan oleh laporan keuangan.

Pemilihan Kota Denpasar sebagai lokasi penelitian didasarkan pada bahwa Kota Denpasar sebagai kota metropolitan mengalami perkembangan UMKM sangat pesat hal ini terbukti dengan pertumbuhan UMKM mencapai sebanyak 32.626 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdata berada di Kota Denpasar yang tersebar di empat kecamatan. Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar mencatat di Kecamatan Denpasar Selatan ada 7.873 UMKM, Denpasar Barat 10.463, Denpasar Timur 4.721, dan Denpasar Utara 9.569 UMKM. Dari puluhan ribu UMKM tersebut, sebanyak 33 persen bergerak di kuliner. Sisanya *fashion* 24 persen, pendidikan 3 persen, otomotif 8 persen, agrobisnis 18 persen, teknologi informasi 3 persen, dan lainnya 11 persen (Putri, 2024).

Fungsional Pengembang Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar I Gede Abdi Pustaka menjelaskan dari tahun ke tahun jumlah UMKM di Denpasar terus bertumbuh. Pada 2021 total UMKM 32.320 unit, 2022 terdapat 32.476 UMKM, dan pada 2023 ada 32.626 UMKM. Menurutnya, pertumbuhan UMKM tersebut sangat baik bagi roda perekonomian di Denpasar. Terlebih, UMKM juga mampu bertahan saat pandemi COVID-19 (Putri, 2024). Namun demikian masih banyak kendala yang dihadapi para pelaku usaha kecil ini dalam

mengembangkan usahanya yaitu SDM (sumber daya manusia) yang kurang memadai, sulitnya memperoleh modal, masalah bahan baku, produksi, dan persaingan pasar, biaya pemasaran, serta meningkatnya penggunaan barang impor merupakan beberapa penghambat atau masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kota Denpasar (Priyatna, 2023).

Usaha Mikro Bagus *Laundry* yang berlokasi di Kota Denpasar juga mempunyai permasalahan diantaranya meliputi ketersediaan modal yang minim, lemahnya pengetahuan Sumber Daya Manusia terhadap aspek pencatatan administrasi keuangan yang mengakibatkan sulit mengetahui bagaimana kondisi keuangan UMKM pada periode tertentu. Sistem pencatatan administrasi laporan keuangan Usaha Mikro Bagus *Laundry* masih dibuat secara manual yaitu dengan mencatat dengan menggunakan metode konvensional walaupun masih secara sederhana yaitu hanya sebatas pemasukan dan pengeluaran saja, sehingga luaran berupa laporan keuangan yang sesuai SAK (Standar Akuntansi Keuangan) belum bisa dihasilkan UMKM, kondisi tersebut mengakibatkan terhambatnya dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut juga mengakibatkan UMKM mengalami kesulitan dalam proses membuat laporan keuangan UMKM yang sesuai dengan SAK EMKM.

Masalah lain yang dihadapi adalah minimnya pemahaman sumber daya manusia terhadap pencatatan keuangan. Dengan latar belakang pendidikan yang terbatas, pelaku usaha sering kali merasa tidak mampu atau tidak perlu membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Padahal, laporan laba rugi sebagai salah satu komponen utama dalam laporan keuangan mampu memberikan informasi penting mengenai profitabilitas usaha. Dengan adanya laporan laba rugi

yang tersusun secara baik, pelaku UMKM dapat mengetahui apakah usahanya untung atau rugi dalam periode tertentu.

Laporan laba rugi juga menjadi data penting dalam mengukur efisiensi operasional serta sebagai dasar untuk perencanaan keuangan di masa depan. Tanpa laporan laba rugi yang akurat, usaha menjadi rentan terhadap salah pengambilan keputusan yang dapat merugikan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian terhadap kualitas laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi, pada Usaha Mikro seperti Bagus *Laundry*. Dikarenakan keterbatasan informasi pembukuan dan rumitnya siklus pembukuan sehingga Laporan keuangan yang dibuat hanyalah pengisian formulir dan bukan merupakan hasil dari suatu proses akuntansi, tetapi hanyalah laporan di atas kertas saja. Menurut Masdiantini & Warasniasih (2020), analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya adalah keinginan untuk mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah kualitas dari laporan keuangan Usaha Mikro Bagus *Laundry* yang masih menggunakan metode konvensional sudah sesuai dengan SAK EMKM. Berdasarkan uraian diatas maka judul dari penelitian ini adalah **“Analisis Kualitas Laporan Keuangan Usaha Mikro Bagus *Laundry*”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro Bagus *Laundry* memiliki kendala dalam proses pencatatan Laporan Keuangan Usaha secara manual.
2. Kualitas Laporan Keuangan Usaha Mikro Bagus *Laundry* yang masih rendah dan belum sesuai dengan SAK EMKM.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, peneliti memfokuskan untuk meneliti kualitas laporan keuangan UMKM yang masih menggunakan metode konvensional pada Usaha Mikro Bagus *Laundry* apakah sudah sesuai dengan SAK EMKM.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Laporan Keuangan Usaha Mikro Bagus *Laundry* belum berkualitas?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Usaha Mikro Bagus *Laundry* dalam proses pencatatan Laporan Keuangan Usaha secara manual?
3. Bagaimanakah bentuk Laporan Keuangan Usaha yang berkualitas menurut SAK EMKM?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa Laporan Keuangan Usaha Mikro Bagus *Laundry* belum berkualitas.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Usaha Mikro Bagus *Laundry* dalam proses pencatatan Laporan Keuangan Usaha secara manual.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk Laporan Keuangan Usaha yang berkualitas menurut SAK EMKM.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Hasil studi ini akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penulis, memperkuat landasan penelitian sebelumnya, dan diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan literatur dan riset di bidang akuntansi. Selain itu, diharapkan hasil ini dapat menjadi rujukan dan memberikan kontribusi konseptual bagi para peneliti di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan informasi yang lebih mendalam kepada Usaha Mikro Bagus *Laundry* terkait dengan Laporan Keuangan Usaha.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam bidang kontribusi, masukan, dan pengetahuan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur yang berkaitan dengan topik serupa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi

referensi yang berguna bagi para peneliti yang tertarik untuk mengeksplorasi kasus yang serupa di masa mendatang.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam melakukan penelitian serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun sebagai masukan bagi peneliti lain.

